

INSPIRASI

MEMBAWA PENCERAHAN BANGSA

RP 10.000,-

Menyoal Akses Petani terhadap Permodalan



Lembaga Keuangan Mikro Dalam Permodalan Pertanian

Salah satu permasalahan utama pengembangan usaha di bidang pertanian di Indonesia adalah masalah permodalan. Masalah permodalan dan pembiayaan usaha di bidang pertanian tersebut mempunyai cerita yang panjang, sejalan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.



Dr. Hans Z. Kaiwai, M.Sc.,

**Staf Dosen
Ilmu Ekonomi FE Unen**

PENDIDIKAN

- S1 FE Unen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 1991
- S2 Geog Agung University, Jerman Pertanian/Agribisnis 1999
- S3 UniversitasHannuohlinu/Ekonomi 2007 Makassar

Pengalaman Jabatan/Pekerjaan

- 1. Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan FE Unen 1 Oktober 1994 s.d 1 Oktober 1995
- 2. Anggota Senat FE Unen Periode 1995-1998 7 Pebruari 1995 s.d 17 Pebruari 1998
- 3. Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan FE Unen 1 Juni 2000 s.d 1 Agustus 2002
- 4. Anggota Senat FE Unen Periode 1997-2000 13 Pebruari 2001 s.d 1 Pebruari 2002
- 5. Anggota Senat FE Unen Periode 2005-2009 30 Oktober 2005 s.d 1 Pebruari 2009
- 6. Pembantu Dekan I FE Unen Masa Jabatan 2005-2009 26 September 2005 s.d 9 September 2009
- 7. Anggota Senat Unen Periode 2005-2009 5 Oktober 2005 s.d 25 September 2009 5
- 8. Pembantu Dekan I FE Unen Masa Jabatan 2009-2013 9 September 2009 s.d sekarang
- 9. Koordinator Program Magister Keuangan Daerah (MKD) Unen Kerjasama Unhas 8 September 2007 s.d September 2012
- 10. Koordinator Akademik Program Magister Agribisnis Keljasama Unhas-Unen 21 April 2005 s.d 1 Oktober 2009

Berbagai program kerohanian telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain: 1) Proyek Pen- ingkatan Pendaptan Petani (Departemen Pertanian), 2) Ke- lompok Usaha Berjama (KUBB) yang dibina oleh Departemen Sosial, 3) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UUPKS), binaa BKKEKN, 4) Program Penggadaan UFKd yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM, dan 5) dan program-program pemberdayaan masyarakat dengan berbagai bentuk dan strateginya. Dimana semua program tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan permodalan kepada masyarakat miskin (kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses modal/kredit pertanaman).

Suatu kemampuan yang telah dicapai dari segi regulasi dan peraturan perundang-undangan adalah telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mi- kro, Kecil, dan Menengah. Di- mana kegiatan usaha ekonomi produktif terutama usaha mi- kro, usaha kecil dan menengah telah diberi tempat yang layak. Berdasarkan undang-undang tersebut kerangka pemberda- yaan masyarakat melalui usaha mikro, kecil dan menengah antara lain dapat dilakukan dengan penguatan permodalan, kelembagaan dan sumber daya manusia, pemasaran, produksi

dan pengalihan maupun desain dan teknologi. Walaupun dalam praktiknya kelompok usaha ini dalam konteks pemberian pinjaman kredit secara nasional ma- sih belum diberi tempat yang layak. Kelompok usaha ini (usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah) hanya mem- peroleh akses kurang dari 25% ukuran pemberian pinjaman yang berlain dalam sistem perkreditan nasional. Program akses terhadap perkreditan nasional terpadat akan semakin kecil tidak lebih dari 10% jika dilihat dari segi bidang usaha pertanian.

Kebijakan pertanahan ber- tuk skim kredit atau program pemberdayaan dan strategi penanggulangan kemiskinan nasional dilakukan dalam ber- tuk pemberian bantuan pemro- dalan (dana bergulir atau dalam bentuk program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), BUMN merupakan program jangka pendek yang sering terkait ori- entasi politik.

Para pelaku usaha dalam kelompok usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah me- melankan suatu sistem pendaa- nian permodalan yang berhin- grai dengan sistem perbankkan dan moneter nasional, baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank maupun len- baga keuangan bukan bank. Oleh sebab itu, RUU Lembaga Keuangan Mikro (LKMD) meru- pakkan suatu pasyarakat pengem- bangan usaha ini.

Dalam praktek pengelo- laan dana pinjaman di Indo- nesia, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hanya memperoleh akses terhadap lembaga keuangan formal sebesar 12%. Rendahnya akses terhadap kredit perbankan

antara dikarenakan: 1) skim kredit dan praktik bank tidak sesuai dengan kebutuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, 2) Anggaran besarnya risiko kredit UMKM, 3) UMKd tidak memiliki agunan yang dipen- yarakat pertanahan.

Pengembangan lembaga kredit mikro (UKM) dalam per- modalan pertanian dilaksanakan untuk meningkatkan akses per- modalan pertanian dengan cara kelompok modalitas sebagai per- modalan. Oleh sebab itu skema kredit dalam layanan lembaga kredit mikro harus berbasis ke- mampuan yang didasarkan untuk menunjang akses permodalan nasional.

Penggunaan skema keuang- an mikro bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 1) dapat mengembangkan keraga- ka kebijakan untuk member- dayakan masyarakat, 2) men- dorong upaya kemitraan, 3) meningkatkan jaringan kornu- nika. Selanjutnya manfaat dari pengembangan skema pemoda- laan tersebut adalah: 1) menye- diakan pelayanan permodalan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 2) menawarkan kredit kepada kelompok ma- syarakat miskin, 3) disesuaikan dengan kesepakatan yang dibuat bersama, 4) menggu- nakan proses pemberdayaan untuk meningkatkan harga diri, 5) mengembangkan institusi sendiri dan berkembang.

Lembaga Keuangan Mikro (LKMD) di Indonesia telah tum- buh dan berkembang, sebagai sumber pembiayaan anggot- anya, cukup banyak dan me- nyebar. Hingga saat ini kurang lebih telah tercatat 150.000 LKMD yang telah memberikan man- fat kepada 55,7 juta UMKM. Walaupun demikian masalah kompetensi dan kelayakan sebagai suatu lembaga keuan- gan yang melayani masya- rakat dalam hal simpan-pinjam perlu diperhatikan untuk di- perbaiki.

Salah satu langkah kong- kri yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah menyele- sikan RUU Lembaga Keuan- gan Mikro (LKMD) yang meng- gunakan berbagai pengalaman best-practice sejumlah lembaga keuangan mikro yang telah dikembangkan berbagai negara seperti India, Bangladesh dan Thailand.

Bank Rakyat Indonesia telah diakui dan berpengalaman dalam pelayanan kredit skala mikro sehingga dapat sebagai The Biggest and The Best Micro Banking System in The World, sebagai The Best Micro Bank dalam The Best World Banking System. Dimana pelayanan dari kedua sistem tersebut adalah:

BRI Link Kemudahan wa- tuk memobilisasi dana ma- syarakat dan kegiatan usaha secara komersial yang sangat tanpa subsidi
Gramedia Bank Kemam- puan untuk menjangkau masyarakat miskin melalui produk-kurif dan siap masuk dalam arus kegiatan ekonomi kelas serta memantapkan mo- kalmata permodalan usaha
Penerbitan Permodalan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia perlu dipertimbangkan dalam be- ntuak dan manajemen guan- gen antara BRI-unit dan Gra- media Bank. Sementara ini dapat ditunjukkan dalam kerangka ben- tuak kompetensi simpan pinjam, karnan harus Verifikasi/assasi dan baktaria sebagai suatu lembaga keuangan yang efektif.



Bank BRI